



**LAPORAN  
AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH  
(LAKIP)  
BAPPEDA KOTA BANDA ACEH  
TAHUN 2018**

## Kata Pengantar

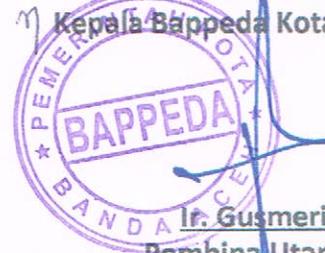
Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2018 dapat diselesaikan, sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang telah dicapai oleh Bappeda Kota Banda Aceh dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

LAKIP Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2018 disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Penyusunan LAKIP Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2018 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Bappeda Kota Banda Aceh. Komitmen dalam penyusunan LAKIP Bappeda Kota Banda Aceh, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Bappeda Kota Banda Aceh untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Akhir kata, masih diperlukan adanya analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif agar dapat digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan publik dalam mendukung tercapainya *good governance* oleh Bappeda Kota Banda Aceh pada masa mendatang dapat terus ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan masukan dan saran yang konstruktif agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Banda Aceh, 31 Januari 2018

Kepala Bappeda Kota Banda Aceh



Ir. Gusmeri, M.T

Pembina Utama Muda

NIP. 19590810 198903 1 003

## Daftar Isi

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Ringkasan Eksekutif .....	iii
<b>Bab I      Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	2
1.3. Isu Strategis .....	2
1.4. Struktur Organisasi .....	3
1.5. Dasar Hukum .....	4
<b>Bab II     Perencanaan dan Perjanjian Kinerja .....</b>	<b>6</b>
2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .....	6
2.2. Rencana Kerja, Program, dan Kegiatan .....	7
2.3. Penetapan Kinerja .....	16
2.4. Penganggaran Kegiatan .....	17
<b>Bab III    Akuntabilitas Kinerja .....</b>	<b>20</b>
3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	20
3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama .....	20
3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	26
3.4. Akuntabilitas Keuangan .....	30
<b>Bab IV    Penutup.....</b>	<b>35</b>

**Lampiran:**

Lampiran I Rencana Strategis (RS) 2017-2022

Lampiran II Penetapan Kinerja (PK) 2018

Lampiran III Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2018

Lampiran IV Pengukuran Kinerja 2018

Struktur Organisasi Bappeda Kota Banda Aceh

## Ringkasan Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2018 disusun sebagai bahan pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan program dan kegiatan oleh Bappeda Kota Banda Aceh pada Tahun 2018 dengan berorientasi pada hasil (outcome) yang ingin dicapai. LAKIP Bappeda Kota Banda Aceh mengacu pada Penetapan Kinerja (performance agreement) yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2018 untuk mencapai sasaran strategis (performance goal) Bappeda Kota Banda Aceh yaitu **“Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif”**. Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis Bappeda Kota Banda Aceh tersebut, ditetapkanlah indikator sasaran strategis (performance indicator) yang kemudian ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Banda Aceh. Adapun Indikator sasaran strategis Bappeda Kota Banda Aceh terdiri dari 5 (lima) indikator, yaitu:

1. Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD;
2. Persentase OPD yang Renstranya selaras dengan RPJMD;
3. Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD;
4. Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target; dan
5. Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam aplikasi perencanaan.

Adapun sistematika penyajian LAKIP Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Cakupan LAKIP Kota Banda Aceh Tahun 2018 terdiri atas:

- a. Bab I Pendahuluan, terdiri dari:
  1. latar belakang;
  2. maksud dan tujuan;
  3. isu strategis;
  4. struktur organisasi; dan
  5. dasar hukum.
- b. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, terdiri dari:
  1. uraian singkat visi dan misi RPJMD Kota Banda Aceh periode 2017-2022 serta hubungannya dengan sasaran strategis Bappeda;
  2. Rencana Kerja, Program dan Kegiatan;

3. Penetapan Kinerja; dan
  4. Penganggaran Kegiatan.
- c. Akuntabilitas Kinerja, terdiri dari:
1. Skala Nilai Peringkat Kinerja;
  2. Capaian Indikator Kinerja Utama;
  3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja; dan
  4. Akuntabilitas Keuangan.

Secara keseluruhan hasil pencapaian kinerja Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2018 dapat terlihat dari rata-rata persentase realisasi terhadap target indikator sasaran pada tahun 2018 mencapai 94,72%, yang berarti bahwa Skala Nilai Peringkat Kinerja Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2018 berada pada kriteria **sangat tinggi**.

Akuntabilitas keuangan Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2018 berada pada kriteria **sangat tinggi**. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata persentase realisasi anggaran pada Tahun 2018 sebesar Rp. 4.742.619.787,- atau sebesar 94,78% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 5.003.986.088,-.

Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program dan kegiatan Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2017 telah mencapai target yang telah ditetapkan, dengan harapan semoga di tahun mendatang dapat dipertahankan dan diupayakan semaksimal mungkin untuk lebih ditingkatkan.

Banda Aceh, 31 Januari 2018  
Kepala Bappeda Kota Banda Aceh



Ar. Gusmeri, M.T  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590810 198903 1 003

<b>Bab I</b>	<u>1.1 Latar Belakang</u>
	<u>1.2 Maksud dan Tujuan</u>
	<u>1.3 Isu Strategis</u>
	<u>1.4 Struktur Organisasi</u>
	<u>1.5 Dasar Hukum</u>

# Pendahuluan

## 1.1. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis, melembaga dan periodik. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah digunakan untuk mengukur apakah kinerja instansi pemerintah telah menjalankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bersih (clean and good governance). Kriteria kunci pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih adalah menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. LAKIP kemudian disusun sebagai laporan pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam menjalankan pelaksanaan prinsip clean and good governance.

Selain itu, penyusunan LAKIP merupakan amanat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Sedangkan tata cara penyusunan LAKIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana proses penyusunan LAKIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah. LAKIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi sehingga esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah dapat diukur dan diwujudkan.

## 1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LAKIP Kota Banda Aceh adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kota Banda Aceh selama kurun waktu 1 tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LAKIP Bappeda Kota Banda Aceh juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja Bappeda Kota Banda Aceh.

Penyusunan LAKIP Bappeda Kota Banda Aceh bertujuan untuk:

1. Menyajikan informasi kinerja berupa hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja Bappeda tahun 2018, termasuk menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan, serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil;
2. Menguraikan aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan pada tahun 2018 dengan hasil atau manfaat yang diperoleh (akuntabilitas keuangan); dan
3. Menguraikan secara singkat hubungan antara capaian pelaksanaan Renstra Bappeda periode tahun 2017-2022 melalui realisasi pelaksanaan Renja tahun 2018, beserta sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2018 dan kaitannya dengan capaian tujuan yang hendak oleh Bappeda Kota Banda Aceh periode tahun 2017-2022, yaitu **meningkatnya perencanaan pembangunan yang berkualitas, aspiratif dan aplikatif.**

## 1.3. Isu Strategis

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda sebagai lembaga teknis perencanaan pembangunan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintah daerah, ada beberapa permasalahan utama yang menjadi Isu strategis (strategic issues) berdasarkan gambaran kondisi saat ini serta kondisi yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Adapun permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan yang berbasis mitigasi bencana, mengingat kota Banda Aceh termasuk daerah rawan bencana, terutama gempa dan tsunami;

2. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, terutama perencanaan sektoral, diharapkan sesuai dengan komitmen nasional dan menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang baru;
3. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sarana dan prasarana wilayah dan pemanfaatan lahan yang sesuai dengan tata ruang wilayah dan pengelolaan lingkungan; dan
4. Mengoptimalkan Koordinasi antar OPD dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah, terutama dalam usaha pencapaian misi ke 5 walikota Banda Aceh periode tahun 2017-2022 yaitu **Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik**, yang menjadi tupoksi Bappeda Kota Banda Aceh.

#### 1.4. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 62 Tahun 2016, struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Unsur Pimpinan yaitu: Kepala Badan
- b. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sekretariat, yang terdiri dari:
  1. Subbagian Program dan Pelaporan
  2. Subbagian Keuangan
  3. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset
- c. Unsur Pelaksana terdiri dari:
  1. Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian Program dan Evaluasi, membawahi:
    - Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
    - Subbidang Pengintegrasian dan Harmonisasi Program; dan
    - Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.
  2. Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan, membawahi:
    - Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
    - Subbidang Kesejahteraan Sosial dan Kependudukan; dan
    - Subbidang Kelembagaan dan Keistimewaan.
  3. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahi:

- Subbidang Pengembangan Industri, Perdagangan, Ketenagakerjaan, dan Pemberdayaan Masyarakat
  - Subbidang Pengembangan Keuangan Daerah dan Investasi dan
  - Subbidang Sumber Daya Alam dan Ketahanan Pangan.
4. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi:
- Subbidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan
  - Subbidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penanggulangan Bencana; dan
  - Subbidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Unit Pelaksanaan Teknis Badan.

### 1.5. Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan LAKIP Bappeda Tahun 2018 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;

9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; dan
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah.

<b>Bab II</b>	<u>2.1 Visi, Misi dan Sasaran</u>
	<u>2.2 Rencana Kerja, Program, dan Kegiatan</u>
	<u>2.3 Penetapan Kinerja</u>
	<u>2.4 Penganggaran Kegiatan</u>

## Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

### 2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Banda Aceh

Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banda Aceh tahun 2017-2022 adalah:

**“Terwujudnya Kota Banda Aceh GEMILANG dalam bingkai Syariah”**

Misi untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah:

1. Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguatan aqidah, syariah dan akhlak Memperkuat sistem perencanaan pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga;
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan kesejahteraan masyarakat;
4. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik;
6. Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
7. Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2017-2022 serta sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada perencanaan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan Bappeda maka fungsi dan tugas Bappeda terkait erat dengan pencapaian misi ke-5, yaitu **“Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik”**.

Untuk mendukung pencapaian misi tersebut, maka Bappeda Kota Banda Aceh di dalam Renstra Bappeda periode tahun 2017-2022 menetapkan tujuan dan sasaran strategis Bappeda Kota Banda Aceh. Tujuan dan sasaran Strategis Bappeda Kota Banda Aceh ditetapkan untuk prioritas perencanaan program dan kegiatan yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Bappeda Kota Banda Aceh selama lima tahun.

Berikut disajikan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kota Banda Aceh:

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 5 RPJM 2017-2022:	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik		
Meningkatnya perencanaan pembangunan yang berkualitas, aspiratif dan aplikatif	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membangun komitmen antar pelaku pembangunan untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan perencanaan kepemimpinan, dan teknis fungsional perencana</li> <li>Membangun sistem database yang dapat diakses secara online</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyusun dokumen perencanaan yang partisipatif dan sinergi dengan dokumen perencanaan lainnya</li> <li>Pemeliharaan dan pemeliharaan database yang terkoneksi dengan OPD</li> </ol>

Sumber: Renstra Bappeda 2017-2022

## 2.2 Rencana Kerja, Program, dan Kegiatan Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2018

Dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Bappeda Kota Banda Aceh menetapkan indikator sasaran serta target capaian indikator sasaran yang ingin dicapai setiap tahun. Target kinerja tahun 2018 direncanakan menyesuaikan dengan Renstra Bappeda kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2018.

Bappeda pada Tahun anggaran 2018 akan melaksanakan 11 (sebelas) Program dan 31 (tiga puluh satu) kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

### a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran telah dilaksanakan 10 (sepuluh) kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor
4. Penyediaan alat tulis kantor

5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7. Penyediaan makanan dan minuman
8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
9. Penyediaan jasa pelelangan/pengadaan barang
10. Penyediaan Jasa tenaga pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

**b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Untuk mencapai tujuan program telah dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan sebagai berikut:

1. Pengadaan peralatan gedung kantor
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

**c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Untuk mencapai tujuan program, dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

**d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Untuk mencapai tujuan program, dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

**e. Program Pengembangan Data Informasi**

Pada Program Pengembangan Data Informasi Untuk mencapai tujuan program telah dilaksanakan 6 (enam) kegiatan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Updating Dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program Dan Kegiatan
2. Penyusunan dan Pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
3. Penyusunan dan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi
4. Pengembangan Informasi dan Data Spasial (GIS)
5. Penyusunan Buku Tinjauan Perekonomian dan Statistik

6. Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan

**f. Program Kerjasama Pembangunan**

Pada program Kerjasama Pembangunan Untuk mencapai tujuan program telah dilaksanakan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

1. Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga

**g. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Pada program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Untuk mencapai tujuan program telah dilaksanakan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

**h. Program Kerjasama Pembangunan**

Pada program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Untuk mencapai tujuan program telah dilaksanakan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

1. Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/ Lembaga

**i. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar**

Pada Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar Untuk mencapai tujuan program telah dilaksanakan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi Perencanaan Air minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan
2. Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Tata Ruang

**j. Program Perencanaan Pembangunan Daerah**

Pada Program Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mencapai tujuan program telah dilaksanakan 5 (lima) kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
3. Penyusunan Kebijakan Umum APBD

4. Penyelenggaraan Musrena
5. Rapat Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh

**k. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi**

Pada Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi untuk mencapai tujuan program telah dilaksanakan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan

**l. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya**

Pada Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi untuk mencapai tujuan program telah dilaksanakan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

1. Grand Design Pembangunan Kependudukan

Adapun hubungan program dan kegiatan tersebut terhadap pencapaian sasaran strategis dan indikator sasaran strategis Bappeda Kota Banda Aceh untuk tahun 2018 diuraikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.2**  
**Rencana Kinerja Tahun 2018**

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos yang disediakan	10 benda pos
			2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah waktu Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik yang disediakan	12 Bulan
			3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah waktu Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan	12 Bulan
			4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	56 Jenis
			5	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetak & Penggandaan yang disediakan	9 Jenis
			6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 Jenis
			7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi Makanan dan Minuman yang disediakan	7260 porsi
			8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	30 Laporan
			9	Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang	Jumlah waktu Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang yang disediakan	6 Bulan
			10	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah waktu Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran yang disediakan	12 Bulan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang disediakan	75 jenis
			2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan	1 kali
			3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang dilaksanakan	156 kali
			4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor yang dilaksanakan	388 kali
		Peningkatan Disiplin Aparatur	1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang disediakan	57 stel/orang
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimbingan Teknis	5 org
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif	1 Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD	1.1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.1.1 Rapat Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh	Jumlah buku Rapat Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh	2 buku

Sasaran Strategis		Indikator Sasaran		Program		Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
	2	Persentase OPD yang Renstranya selaras dengan RPJMD	2.1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2.1.1	Penyusunan Kebijakan Umum APBD	Jumlah dokumen Kebijakan Umum APBD	4 dokumen
	2.2		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	2.2.1	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah laporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan	1 Laporan	
	2.3		Program Perencanaan Pembangunan Sosial budaya	2.3.1	Grand design pembangunan kependudukan	Jumlah dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan	1 dokumen	
	3	Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD	3.1	Program Kerjasama Pembangunan	3.1.1	Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga	Jumlah Lembaga yang menjalin kerjasama	5 Lembaga
			3.2	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	3.2.1	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Jumlah laporan Perencanaan Pengembangan Strategis dan Cepat Tumbuh	1 Laporan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
		3.3 Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	3.3.1 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi	Jumlah laporan Perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	1 Laporan
4	Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target	4.1 Program Pengembangan Data/Informasi	4.1.1 Pengumpulan updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	Jumlah laporan Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	1 Laporan
			4.1.2 Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah laporan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan.	1 Laporan
			4.1.3 Penyusunan dan Analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi	Jumlah laporan Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1 Laporan
			4.1.4 Pengembangan Informasi dan Data Spatial (GIS)	Jumlah Peta Spatial	1 peta
			4.1.5 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi hasil- hasil penelitian dan pengembangan	Jumlah laporan Informasi Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan	1 Laporan
		4.2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	4.2.1 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	3 Laporan

Sasaran Strategis		Indikator Sasaran		Program		Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
	5	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam aplikasi perencanaan	5.1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	5.1.1	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang	250 orang
					5.1.2	Penyelenggaraan Musrena	Jumlah peserta yang mengikuti Musrena	200 orang

Sumber: RKT Bappeda Banda Aceh Tahun 2018

### 2.3 Penetapan Kinerja

Dalam perjanjian kinerja Bappeda pada Tahun 2018, untuk mencapai target sasaran sesuai dengan RKT Tahun 2018, Bappeda Kota Banda Aceh telah melaksanakan perjanjian dengan Walikota Banda Aceh melalui indikator Program/kegiatan beserta target yang ingin dicapai pada tahun 2018 sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 2.3.**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2018**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang selaras dan aplikatif	1.1 Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD	76% (140 Program RKPD yang Selaras dari 184 Program RPJMD)
		1.2 Persentase OPD yang Renstranya selaras dengan RPJMD	100% (44 OPD dari 44 OPD)
		1.3 Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD	100% (44 OPD dari 44 OPD)
		1.4 Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target	65% (13 Indikator dari 20 Indikator Kinerja RPJMD)
		1.5 Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam aplikasi perencanaan	33% (90 Usulan dari 270 Usulan)

	Program	Anggaran
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.086.706.358
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.002.529.800
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	30.250.000
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	35.000.000
5	Pengembangan data informasi	884.126.680
6	Kerjasama Pembangunan	281.484.100
7	Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	223.465.010
8	Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	173.934.970
9	Perencanaan Pembangunan	768.154.780

10	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	84.248.390
11	Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	201.038.000
<b>Jumlah</b>		<b>4.770.938.088</b>

## 2.4 Penganggaran Kegiatan

Pada Tahun Anggaran 2018 Bappeda Kota Banda Aceh melaksanakan Program/kegiatan dengan rincian anggaran seperti dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 2.4**  
**Penganggaran Kegiatan Tahun 2018**

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan		Anggaran
			No	Uraian	
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.250.000
			2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	323.674.856
			3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	17.383.620
			4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	38.707.150
			5	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	32.179.704
			6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.368.550
			7	Penyediaan Makanan dan Minuman	131.918.000
			8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	539.729.108
			9	Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang	3.600.000
			10	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	126.380.000
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	812.955.000
			2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung	351.300.000

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Anggaran
			Kantor	
			3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	86.384.000
			4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	39.470.800
		Peningkatan Disiplin Aparatur	1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	31.900.000
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	16.000.000
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif	1 Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD	1.1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.1.1 Rapat Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh	113.054.660
	2 Persentase OPD yang Renstranya selaras dengan RPJMD	2.1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2.1.1 Penyusunan Kebijakan Umum APBD	228.548.210
		2.2 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	2.2.1 Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan	121.760.190
		2.3 Program Perencanaan Pembangunan Sosial budaya	2.3.1 Grand design pembangunan kependudukan	178.013.000
	3 Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD	3.1 Program Kerjasama Pembangunan	3.1.1 Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga	366.109.100
		3.2 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	3.2.1 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	267.265.010

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Anggaran	
		3.3 Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	3.3.1 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi	110.183.590	
4	Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target	4.1 Program Pengembangan Data/Informasi	4.1.1 Pengumpulan updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	76.063.650	
			4.1.2 Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	58.131.120	
			4.1.3 Penyusunan dan Analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi	118.326.560	
			4.1.4 Pengembangan Informasi dan Data Spasial (GIS)	433.838.100	
			4.1.5 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan	12.950.700	
			4.2.1 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	74.853.350	
	5	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam aplikasi perencanaan	5.1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	5.1.1 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	196.265.030
				5.1.2 Penyelenggaraan Musrena	91.423.030
<b>TOTAL ANGGARAN</b>				<b>5.003.986.088</b>	

Sumber: RKA Bappeda Tahun 2018

Bab III	<u>3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja</u>
	<u>3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama</u>
	<u>3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja</u>
	<u>3.4 Akuntabilitas Keuangan</u>

## *Akuntabilitas Kinerja*

### 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

Penilaian kinerja telah dilaksanakan oleh Bappeda Kota Banda Aceh dengan berpedoman pada Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penilaian dilakukan dengan memberikan peringkat capaian kinerja sesuai dengan Skala Nilai Peringkat Kinerja seperti dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 3.1.**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Lampiran VII-C Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

### 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Bappeda Kota Banda Aceh diikuti berbagai target dan realisasi program/kegiatan di Tahun 2018 seperti dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Sasaran Strategis Bappeda Tahun 2018**

SASARAN	INDIKATOR SASARAN		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- 2018	REALISASI KINERJA SASARAN	PERSENTASE REALISASI (%) TERHADAP TARGET TAHUN 2018
1	2		3	4	5
Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	1	Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD	140 Program RKPD yang Selaras dari 148 Program RPJMD	140 Program RKPD yang Selaras dari 140 Program yang ditargetkan	100
	2	Persentase OPD yang Renstranya selaras dengan RPJMD	44 OPD	44 OPD	100
	3	Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD	44 OPD	44 OPD	100
	4	Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target	13 Indikator dari 20 Indikator Kinerja RPJMD	11 Indikator dari 13 Indikator Kinerja RPJMD yang ditargetkan	84,61
	5	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam aplikasi perencanaan	90 Usulan dari 270 Usulan	87 Usulan dari 90 Usulan	96,67
<b>Rata-Rata Persentase Realisasi</b>					<b>96,25</b>

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang terbagi dalam 5 (lima) indikator sasaran strategis, maka jika dilihat dari Tabel 3.2 rata-rata persentase realisasi terhadap target indikator sasaran pada tahun 2018 mencapai **96,25%**, yang berarti bahwa Skala Nilai Peringkat Kinerja Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2018 berada pada kriteria **sangat tinggi**.

Pencapaian indikator pertama Bappeda yaitu persentase keselarasan program RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2018 terhadap RPJMD Kota Banda Aceh periode 2017-2022 yang mencapai 100% dikarenakan penyusunan RKPD disusun hampir bersamaan dengan penyusunan RPJMD, sehingga Indikator RKPD dapat kita selaraskan langsung dengan indikator di tahun pertama RPJMD yaitu di tahun 2018.

Untuk pencapaian indikator kedua dan ketiga, yaitu persentase OPD yang Renstranya selaras dengan RPJMD dan Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD yang mencapai 100% dikarenakan adanya pelaksanaan asistensi dan koordinasi yang terus menerus terhadap penyusunan Renstra OPD periode Tahun 2017-2022 dan Renja OPD

Tahun 2018 melalui 3 (tiga) bidang pelaksana perencanaan yang mengasistensi 44 OPD di Kota Banda Aceh.

Indikator strategis Bappeda yang keempat, yaitu persentase indikator kinerja dalam RPJMD yang mencapai target di Tahun 2018 yang mencapai 84,61%. Hal ini dikarenakan adanya komitmen OPD secara sungguh-sungguh merealisasikan indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai target dalam RPJMD, serta adanya kerjasama antara Bappeda Kota Banda Aceh, Inspektorat dan Bagian Organisasi Sekretariat Kota Banda Aceh dalam memonitoring dan mengevaluasi Kinerja OPD yang terus menerus minimal 3 (tiga) bulan sekali (per triwulan), sehingga 11(sebelas) indikator kinerja RPJMD dari 13 indikator target di Tahun 2018 dapat memenuhi target (dapat dilihat pada tabel 3.3).

Selain itu ada beberapa data capaian indikator tahun 2018 yang masih menggunakan data tahun 2017 dikarenakan data tahun 2018 dari buku Kota Banda Aceh dalam Angka dan buku Tinjauan Perekonomian Kota Banda Aceh belum tersedia. Buku tersebut baru akan diterbitkan akhir tahun 2019, untuk data tahun 2018.

Pencapaian indikator kelima Bappeda yaitu persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam aplikasi perencanaan yang mencapai 96,76 persen dikarenakan komitmen dari Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mengakomodir paling sedikit 3 (tiga) usulan dari Desa (gampong) dari 90 (sembilan puluh) desa yang ada di Kota Banda Aceh. Terakomodirnya usulan masyarakat merupakan penerapan *bottom-up policy process* yang dimulai dari proses perencanaan berupa hasil dari Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa yang menghasilkan minimal 5 (lima) usulan yang kemudian disaring menjadi 3 (tiga) usulan per desa melalui Musrenbang Kecamatan. Hasil dari Musrenbang Kecamatan yang berupa 3 usulan tersebut kemudian diinput ke dalam aplikasi E-Musrenbang. Usulan di aplikasi E-Musrenbang kemudian didiskusikan ke dalam forum OPD untuk memilah dan menetapkan OPD yang cocok sesuai sasaran strategisnya untuk mengakomodir usulan-usulan tersebut.

**Tabel 3.3**  
**Capaian Kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2018**

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2018	REALISASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam Dalam Bidang Aqidah, Syariah dan Akhlak	Terwujudnya nilai - nilai Islami dalam seluruh aspek kehidupan warga Kota Banda Aceh	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penerapan syariat Islam	Nilai Survey Pelaksanaan Syariat Islam Banda Aceh	65%	70,20%	Dinas Syariat Islam
				Penurunan angka pelanggaran terhadap Qanun Syariat Islam	180 Kasus	215 kasus	Satpol PP & WH
2	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	Mewujudkan pendidikan kota Banda Aceh yang bermutu, berdaya saing, berkarakter Islami dan berprestasi	Terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada setiap jenjang pendidikan	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	70%	76,31%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase siswa yang mampu menghafal Al-Quran	5%	4,15%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Tingkat Prestasi kota di POPDA	Peringkat 4	Peringkat 4	Dinas Pemuda dan Olah Raga
3	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Pariwisata dan Kesejahteraan Masyarakat	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusive dan kesejahteraan merata	Peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pertumbuhan PDRB	4,04%	3,04% (tahun 2017)	Bappeda
				Koefisien Gini	0,315	0,314 (tahun 2017)	Bappeda
				Angka kemiskinan	18.621 Jiwa	18.621 Jiwa	Dinas Sosial
				Tingkat Pengangguran Terbuka	7,35%	7,29%	Dinas Tenaga Kerja
				Persentase peningkatan nilai investasi	14,29%	184,17%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2018	REALISASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah kunjungan wisatawan	300.000 Orang	393.400 orang	Dinas Pariwisata
4	Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,5	0,38	Dinas Kesehatan
5	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Terwujudnya Kota Banda Aceh sebagai Kota Ramah Birokrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	70%	84,18%	Sekretariat Daerah
			Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Nilai pemeringkatan pemerintahan berbasis elektronik	2,65 (CC)	2,65 (CC) (tahun 2017)	Dinas Kominfo
6	Membangun Infrastruktur Kota yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana serta prasarana kota yang berwawasan lingkungan dan berkesinambungan	Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian Kota Layak Huni	Indeks Kota Layak Huni	61,40%	60,9% (data tahun 2017)	Bappeda
			Mitigasi kebencanaan yang tangguh	Indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	0,80	0,80	BPBD
			Pemenuhan kebutuhan energi listrik dari sumber energi terbarukan	Jumlah daya pasokan listrik dari energi terbarukan	14,76 KWp	13,6 KWp	DLHK3
7	Memperkuat Upaya Pemberdayaan Perempuan dan	Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak serta pengendalian	Pemerataan pembangunan berbasis gender dan ramah anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,66%	95,40% (data tahun 2017)	DP3AP2KB

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2018	REALISASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
	Perlindungan Anak	penduduk		Persentase Indikator Kota layak anak yang dipenuhi	53%	64%	DP3AP2KB
			Pengendalian pertumbuhan penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	0,09%	3,04% (Tahun 2017)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### 3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

#### 3.3.1 Evaluasi dan Analisis Penyebab Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang akan dilakukan

Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian Bappeda Kota Banda Aceh diantaranya:

1. Belum optimalnya ketersediaan data statistik yang dihasilkan dalam rangka pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan;
2. Keterbatasan sumber daya manusia aparatur Pemerintah Kota Banda Aceh terutama aparatur fungsional perencana dalam penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan;
3. Kurang optimalnya koordinasi dan keterpaduan data dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan; dan
4. Kurang optimalnya pengendalian program dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Terhadap permasalahan tersebut, beberapa hal yang perlu segera dilakukan Bappeda Kota Banda Aceh diantaranya:

1. Mengoptimalkan fungsi perencanaan dengan upaya peningkatan koordinasi antar bidang serta peningkatan kualitas pendampingan oleh bidang-bidang terhadap masing-masing OPD dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
2. Meningkatkan koordinasi dan pengelolaan data untuk menyediakan data dan informasi yang berkualitas dan terkini sebagai bahan perencanaan di semua sektor;
3. Meningkatkan fungsi keberadaan website Bappeda Kota Banda Aceh dalam menyajikan data-data informasi yang dipublikasikan;
4. Mengoptimalkan aplikasi dalam hal penyebarluaskan informasi menyangkut perencanaan pembangunan daerah; dan
5. Meningkatkan fungsi monitoring dan evaluasi program kegiatan pembangunan sebagai salah satu penentu keberhasilan perencanaan pembangunan daerah.

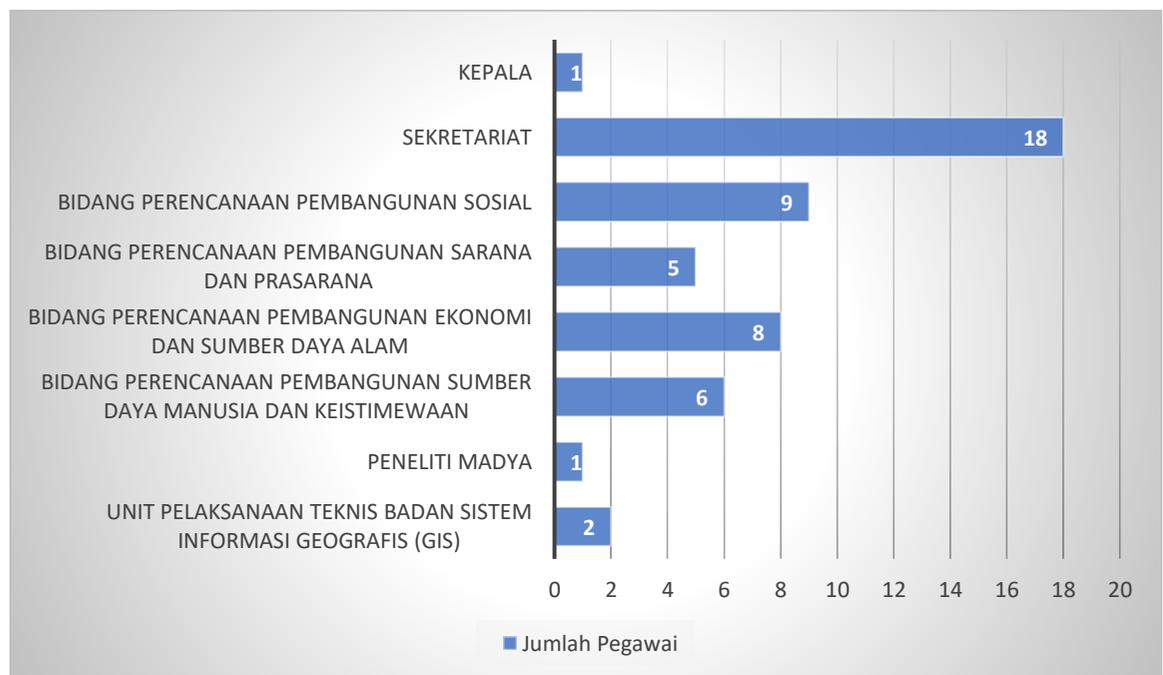
#### 3.3.2 Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya aparatur merupakan salah satu faktor penting untuk menunjang peningkatan kinerja. Kondisi pegawai Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2018 sebanyak 56 orang, PNS sebanyak 50 orang, dan Non PNS sebanyak 6 orang. Klasifikasi pegawai Bappeda berdasarkan jabatan dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini:

**Tabel 3.4**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselonering**

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Kepala	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala bidang	4
4	Kepala UPTB	1
5	Kasubbag	3
6	Kasubbid	12
7	Kepala TU UPTB	1
Jumlah		23

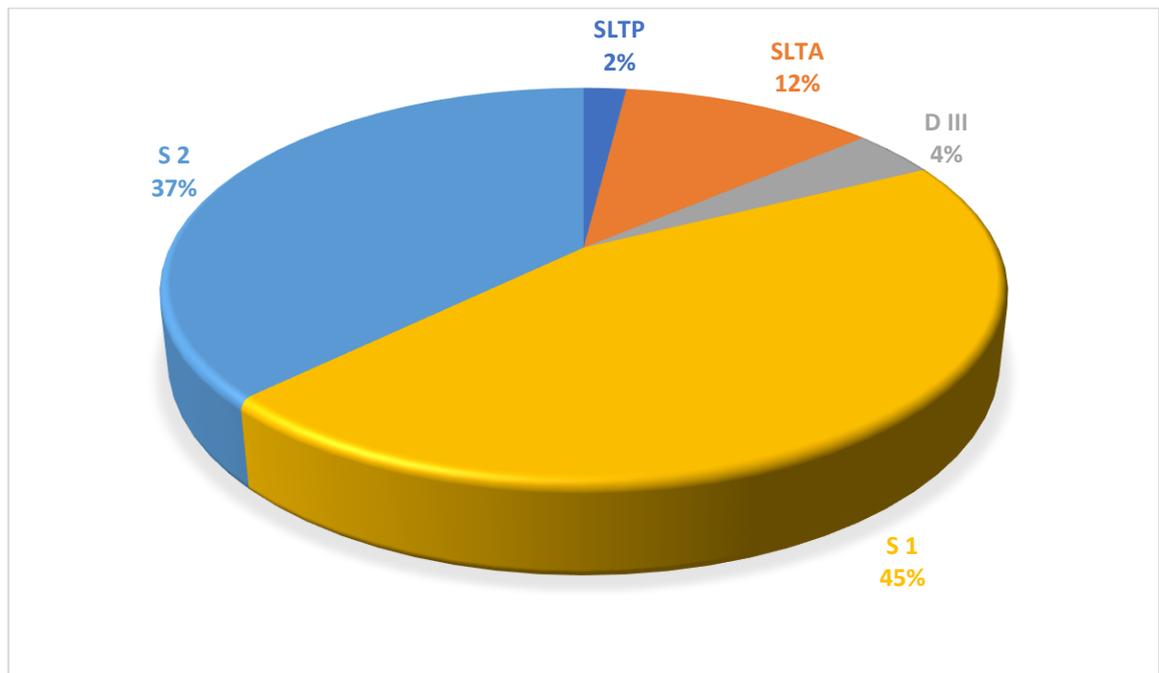
**Grafik 3.1**  
**Kondisi Pegawai Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2018**



Sumber: Data Absensi Pegawai Bappeda 2018

Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai Bappeda Kota Banda Aceh terbanyak pada Strata 1 sebanyak 23 orang, diikuti oleh Strata 2 sebanyak 19 orang, dengan kondisi eksisting saat ini dengan beban kerja yang cukup berat Bappeda masih membutuhkan tenaga staf di bidang perencanaan pembangunan.

**Grafik 3.2**  
**Tingkat Pendidikan Pegawai Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2018**



Dalam hal sarana dan prasarana untuk mendukung pencapaian kinerja di Tahun 2018 Bappeda Kota Banda Aceh telah memiliki Aset seperti yang dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 3.5**  
**Buku Inventaris**

No	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga
1	TANAH	1	6.336.087.000
2	PERALATAN DAN MESIN	866	3.972.594.030
3	BANGUNAN GEDUNG	13	3.546.148.000
4	INSTALASI JARINGAN	2	123.601.000
5	ASSET TETAP LAINNYA	3	420.000
	<b>Jumlah</b>	<b>885</b>	<b>13.978.850.030</b>

### 3.3.3 Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Meningkatnya perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien sangat diperlukan dalam pembangunan daerah sehingga akan terpenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan kota yang berkualitas dan akuntabel. Bappeda kota Banda Aceh menyusun

dokumen perencanaan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, yang telah diimplementasikan dalam kegiatan pembangunan.

RPJP Kota Banda Aceh tahun 2007-2027 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Banda Aceh Tahun 2007–2027. RPJMD Banda Aceh 2017-2022 telah ditetapkan dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022.

Pada tahun 2018, dokumen perencanaan RKPK Banda Aceh Tahun 2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Banda Aceh nomor 23 tahun 2018. Selain itu Dokumen KUA Perubahan dan PPAS Perubahan tahun 2018 telah disepakati bersama antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan DPRK Banda Aceh pada tanggal 22 Mei 2018. Sedangkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2019 telah disepakati pada tanggal 24 September 2018.

Berikut laporan, buku dan dokumen yang sudah dihasilkan untuk mendukung perencanaan di Tahun 2018 yaitu:

**Tabel 3.6**  
**Produk yang telah dihasilkan Bappeda Tahun 2018**

No	Dokumen	Jumlah Dokumen
1	Laporan Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	1 Laporan
2	Laporan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	1 Laporan
3	Laporan Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1 Laporan
4	Buku Tinjauan Perekonomian dan Statistik Kota Banda Aceh	2 jenis buku
5	Laporan Informasi Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan	1 Laporan
6	Laporan Perencanaan Pengembangan Strategis dan Cepat Tumbuh	1 Laporan
7	Laporan Perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	1 Laporan
8	Dokumen RKPD	1 Dokumen
9	Laporan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	3 Laporan
10	Dokumen Kebijakan Umum APBD	4 dokumen
11	Laporan Musrena	1 Laporan
12	Buku Rapat Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh	2 buku
13	Laporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan	1 Laporan
14	Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan	1 dokumen

### 3.4 Akuntabilitas Keuangan

Salah satu aspek akuntabilitas kinerja yang sangat penting adalah akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban institusi publik untuk menggunakan dana publik (public money) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas keuangan menjadi sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja keuangan organisasi kepada pihak internal dan pihak eksternal. Adapun pencapaian realisasi Anggaran kegiatan dalam mendukung sasaran strategis dan indikator sasaran strategis Bappeda Kota Banda Aceh diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.7**  
**Sasaran Strategis dan Realisasi Anggaran Kegiatan**

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSENTASE REALISASI (%)
		1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.250.000	0	0
		2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	323.674.856	279.959.722	86,49
		3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	17.383.620	17.383.620	100,00
		4 Penyediaan Alat Tulis Kantor	38.707.150	38.632.150	99,81
		5 Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	32.179.704	31.274.204	97,19
		6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.368.550	4.351.250	99,60
		7 Penyediaan Makanan dan Minuman	131.918.000	104.648.500	79,33
		8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	539.729.108	520.337.684	96,41
		9 Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang	3.600.000	3.600.000	100,00
		10 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	126.380.000	117.200.000	92,74
		1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	812.955.000	807.256.000	99,30
		2 Pemeliharaan Rutin/Berkala	351.300.000	345.426.000	98,33

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSENTASE REALISASI (%)		
		Gedung Kantor					
		3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	86.384.000	71.643.837	82,94		
		4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	39.470.800	37.783.020	95,72		
		1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	31.900.000	30.800.000	96,55		
		1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	16.000.000	14.200.000	88,75		
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif	1	1.1	Rapat Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh	113.054.660	953.23.160	84,32	
	2	2.1	Penyusunan Kebijakan Umum APBD	228.548.210	227.948.210	99,74	
			2.2	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan	121.760.190	115.596.190	94,94
			2.3	Grand design pembangunan kependudukan	178.013.000	158.560.750	89,07
3	3.1	Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga	366.109.100	359.635.100	98,23		
		3.2	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	267.265.010	264.656.510	99,02	
		3.3	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi	110.183.590	99.441.590	90,25	
	4	4.1	Pengumpulan updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	76.063.650	66.138.650	86,95	
			4.2	Penyusunan dan pengumpulan data informasi	58.131.120	57.604.120	99,09

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSENTASE REALISASI (%)
		kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan			
		4.3 Penyusunan dan Analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi	118.326.560	109.161.310	92,25
		4.4 Pengembangan Informasi dan Data Spatial (GIS)	433.838.100	422.738.100	97,44
		4.5 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan	12.950.700	11.852.950	91,52
		4.6 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	74.853.350	69.047.100	92,24
	5	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam aplikasi perencanaan			
		5.1 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	196.265.030	169.690.780	86,46
		5.2 Penyelenggaraan Musrena	91.423.030	90.729.280	99,24
<b>TOTAL ANGGARAN</b>			<b>5.003.986.088</b>	<b>4.742.619.787</b>	<b>94,78</b>

Berdasarkan Tabel di atas terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang terbagi dalam 5 (lima) indikator sasaran strategis yang didukung oleh 31 (tiga puluh satu) kegiatan, maka jika dilihat dari Tabel 3.7 rata-rata persentase realisasi anggaran terhadap target indikator sasaran pada tahun 2018 mencapai 94,78%, yang berarti bahwa Skala Nilai Peringkat Kinerja Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2018 untuk akuntabilitas keuangan berada pada kriteria **sangat tinggi**.

Dari tabel tersebut, pada Program administrasi perkantoran dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp.1.219.190.988,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.117.387.130,- atau 91,65 persen, anggaran yang tidak direalisasikan lagi sebesar 8,35 persen. Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp.1.290.109.800,- dapat direalisasikan sebesar Rp.1.262.299.857,- atau 97,84 persen, anggaran yang tidak direalisasikan lagi sebesar 2,16 persen. Sedangkan pada Program Peningkatan Disiplin Aparatur dari anggaran yang direncanakan sebesar

Rp.31.900.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 30.800.000,- atau 96,55 persen. Pada program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur anggaran yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 14.200.000 dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp.16.000.000,- atau 88,75 persen.

Program pengembangan Data/Informasi dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 669.310.130,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 667.495.130,- atau 95,45 persen, anggaran yang tidak direalisasikan lagi sebesar 4,55 persen.

Pada Program Kerja Sama Pembangunan dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 366.109.100,- dapat direalisasikan sebesar Rp.359.635.100,- atau 98,83 persen, anggaran yang tidak direalisasikan lagi sebesar 1,17 persen. Anggaran yang tidak terealisasikan dikarenakan tidak ada kebutuhan lagi pada kegiatan. Pada Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Cepat Tumbuh dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 264.656.510,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 264.656.510,- atau 99,02 persen. Pada Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 110.183.590,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 99.441.590,- atau 90,25 persen. Anggaran yang tidak terealisasikan sebesar 9,75 persen dikarenakan tidak ada kebutuhan lagi.

Sedangkan pada Program Perencanaan Pembangunan Daerah dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp.704.144.280,- dapat direalisasikan sebesar Rp.652.738.530,- atau 92,70 persen, terdapat sisa anggaran sebesar 7,30 persen dari yang direncanakan. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp.121.760.190,- dapat direalisasikan sebesar Rp.115.596.190,- atau 94,94 persen, terdapat sisa anggaran sebesar 5,06 persen. Anggaran yang tidak terealisasikan dikarenakan tidak ada kebutuhan lagi.

Secara keseluruhan persentase realisasi Belanja Bappeda Tahun anggaran 2018 sebesar 94,78 persen mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun anggaran 2017. Selama 5 (lima) tahun terakhir realisasi belanja tidak langsung rata-rata persentase realisasinya pertahunnya sebesar 95,12 persen dan belanja langsung sebesar 93,67 persen, ini menunjukkan kinerja kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan yang direncanakan.

**Tabel 3.8**  
**Perkembangan Realisasi Anggaran Belanja Bappeda Kota Banda Aceh**  
**Tahun 2014 s.d 2018**

TAHUN	2014	2015	2016	2017	2018
Belanja	Rp. 7.476.580.651	Rp. 7.449.836.718	Rp. 7.682.858.798	Rp. 9.211.401.169	Rp. 9.525.563.250
Persentase realisasi	93,95%	93,70%	95,99%	93,86%	94,40%
Belanja Tidak Langsung	Rp. 3.755.544.465	Rp. 3.807.012.757	Rp. 4.073.220.293	Rp. 4.494.902.767	Rp. 4.782.752.463
Persentase realisasi	94,92%	92,40%	98,11%	96,15%	94,02%
Belanja Langsung	Rp. 3.721.036.186	Rp. 3.642.823.961	Rp. 3.609.638.505	Rp. 4.716.498.402	Rp. 4.742.810.787
Persentase realisasi	92,99%	95,09%	93,70%	91,77%	94,78%

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa kinerja Bappeda tahun 2018 dalam merealisasikan anggaran belanja menunjukkan peningkatan realisasi dari tahun 2017. Apabila dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran strategis Bappeda yaitu Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif dengan penyerapan anggaran, anggaran pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan Tahun 2018 telah mencukupi.

## *Bab IV*

### *Penutup*

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2018 menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja Instansi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Bappeda Kota Banda Aceh, LAKIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban Bappeda Kota Banda Aceh untuk kepentingan internal dan kepentingan eksternal (publik) dalam upaya mendorong akuntabilitas institusi pemerintahan. Bagi kepentingan internal, LAKIP dapat dijadikan instrumen untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sasaran strategis yang menunjukkan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2018. Sementara bagi kepentingan eksternal (publik), LAKIP menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan Bappeda Kota Banda Aceh dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam perencanaan pembangunan.

Pada Tahun 2018, Bappeda Kota Banda Aceh berhasil mencapai target yang ditentukan berupa pencapaian indikator sasaran strategis capaian kinerja, dimana nilai realisasi rata-rata berada di tingkat **96,25%** dengan penyerapan anggaran sebesar **94,78%**. Hal ini berarti skala nilai akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan Bappeda Kota Banda Aceh berada pada kriteria **sangat tinggi**.

Namun keberhasilan pencapaian target indikator sasaran strategis Bappeda Kota Banda Aceh sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari sistem perencanaan pembangunan. Oleh karena itu peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan, sehingga sasaran strategis yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Banda Aceh periode Tahun 2017-2022 dapat terwujud.

## LAMPIRAN I RENCANA STRATEGIS (RS)

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program	Kegiatan
					Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
						2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
						3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
						4 Penyediaan Alat Tulis Kantor
						5 Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan
						6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
						7 Penyediaan Makanan dan Minuman
						8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
						9 Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang
						10 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
						2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
						3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
						4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
					Peningkatan Disiplin Aparatur	1 Pengadaan mesin atau kartu absensi
						2 Pengadaan pakaian khusus dan hari-hari tertentu
						3 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program	Kegiatan			
	Meningkatnya perencanaan pembangunan yang berkualitas, aspiratif dan aplikatif	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif	1	Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD	Menyusun dokumen perencanaan yang partisipatif dan sinergi dengan dokumen perencanaan lainnya	1.1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.1.1	Penyusunan Rancangan RPJPD
							1.1.2	Penyusunan Rancangan RPJMD	
							1.1.3	Rapat Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh	
			2	Persentase OPD yang Renstranya selaras dengan RPJMD		2.1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2.1.1	Penyusunan Kebijakan Umum APBD
						2.2	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	2.2.1	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan
						2.3	Program Perencanaan Pembangunan Sosial budaya	2.3.1	Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan
								2.3.2	Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan
								2.3.3	Grand design pembangunan kependudukan
								2.3.4	Pengendalian program pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan
			3	Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD		3.1	Program Kerjasama Pembangunan	3.1.1	Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga
					3.2	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	3.2.1	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kebijakan	Program	Kegiatan	
					3.3	Program Perencanaan	3.3.1 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi
						Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	3.3.2 Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Tata Ruang
			4	Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target	4.1	Program Pengembangan Data/Informasi	4.1.1 Pengumpulan updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
							4.1.2 Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
							4.1.3 Penyusunan dan Analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi
							4.1.4 Pengembangan Informasi dan Data Spatial (GIS)
							4.1.5 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan
							4.1.6 Penyusunan Buku Statistik Banda Aceh dan Buku Tinjauan Perekonomian Kota Banda Aceh
					4.2	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	4.2.1 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
			5	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam aplikasi perencanaan	5.1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	5.1.1 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
				Pemeliharaan database yang terkoneksi dengan OPD			5.1.2 Penyelenggaraan Musrena

## LAMPIRAN II PENETAPAN KINERJA (TAPKIN) 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang selaras dan aplikatif	1.1 Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD	76% (140 Program RKPD yang Selaras dari 184 Program RPJMD)
		1.2 Persentase OPD yang Renstranya selaras dengan RPJMD	100% (44 OPD dari 44 OPD)
		1.3 Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD	100% (44 OPD dari 44 OPD)
		1.4 Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target	65% (13 Indikator dari 20 Indikator Kinerja RPJMD)
		1.5 Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam aplikasi perencanaan	33% (90 Usulan dari 270 Usulan)

Program	Anggaran
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.086.706.358
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.002.529.800
3 Peningkatan Disiplin Aparatur	30.250.000
4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	35.000.000
5 Pengembangan data informasi	884.126.680
6 Kerjasama Pembangunan	281.484.100
7 Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	223.465.010
8 Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	173.934.970
9 Perencanaan Pembangunan	768.154.780
10 Perencanaan Pembangunan Ekonomi	84.248.390
11 Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	201.038.000
	<b>4.770.938.088</b>

## LAMPIRAN III RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2018

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos yang disediakan	10 benda pos
			2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah waktu Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik yang disediakan	12 Bulan
			3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah waktu Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan	12 Bulan
			4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	56 Jenis
			5	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetak & Penggandaan yang disediakan	9 Jenis
			6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 Jenis
			7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi Makanan dan Minuman yang disediakan	7260 porsi
			8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	30 Laporan
			9	Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang	Jumlah waktu Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang yang disediakan	6 Bulan
			10	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah waktu Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran yang disediakan	12 Bulan
		Peningkatan Sarana dan	1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang disediakan	75 jenis

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
		Prasarana Aparatur	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan	1 kali		
			3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang dilaksanakan	156 kali		
			4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor yang dilaksanakan	388 kali		
		Peningkatan Disiplin Aparatur	1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang disediakan	57 stel/orang		
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimbingan Teknis	5 org		
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif	1	Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD	1.1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.1.1	Rapat Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh	Jumlah buku Rapat Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh	2 buku
	2	Persentase OPD yang Renstranya selaras dengan RPJMD	2.1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2.1.1	Penyusunan Kebijakan Umum APBD	Jumlah dokumen Kebijakan Umum APBD	4 dokumen

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
		2.2 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	2.2.1 Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah laporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan	1 Laporan
		2.3 Program Perencanaan Pembangunan Sosial budaya	2.3.1 Grand design pembangunan kependudukan	Jumlah dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan	1 dokumen
3	Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD	3.1 Program Kerjasama Pembangunan	3.1.1 Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga	Jumlah Lembaga yang menjalin kerjasama	5 Lembaga
		3.2 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	3.2.1 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Jumlah laporan Perencanaan Pengembangan Strategis dan Cepat Tumbuh	1 Laporan
		3.3 Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	3.3.1 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi	Jumlah laporan Perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	1 Laporan

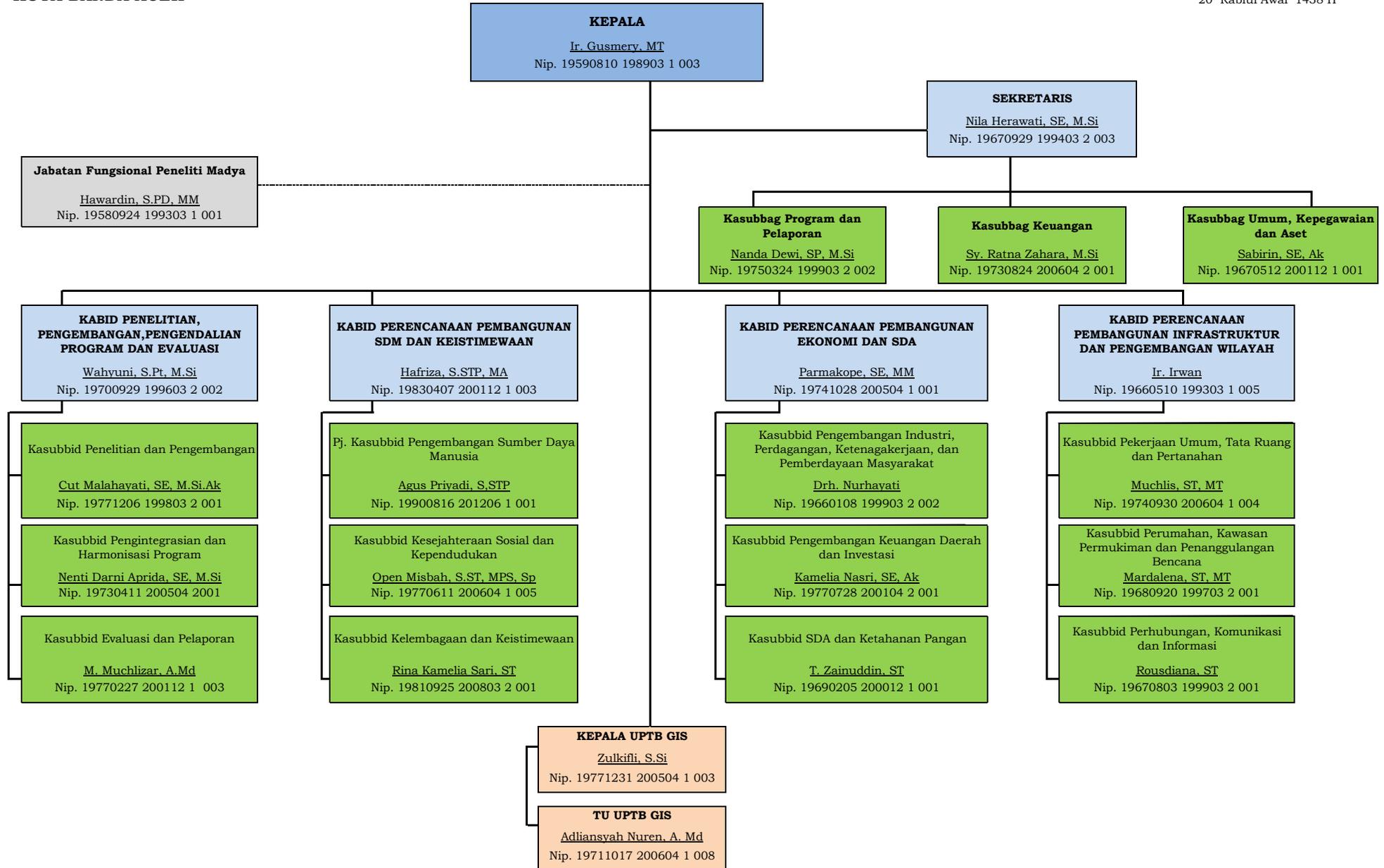
Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		
4	Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target	4.1 Program Pengembangan Data/Informasi	4.1.1	Pengumpulan updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	Jumlah laporan Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	1 Laporan	
			4.1.2	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah laporan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan.	1 Laporan	
			4.1.3	Penyusunan dan Analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi	Jumlah laporan Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1 Laporan	
				4.1.4	Pengembangan Informasi dan Data Spatial (GIS)	Jumlah Peta Spatial	1 peta
				4.1.5	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan	Jumlah laporan Informasi Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan	1 Laporan
		4.2	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	4.2.1	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	3 Laporan
5	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam aplikasi perencanaan	5.1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	5.1.1	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang	250 orang	
			5.1.2	Penyelenggaraan Musrena	Jumlah peserta yang mengikuti Musrena	200 orang	

## LAMPIRAN IV PENGUKURAN KINERJA 2018

SASARAN	INDIKATOR SASARAN		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- 2018	REALISASI KINERJA SASARAN	PERSENTASE REALISASI (%) TERHADAP TARGET TAHUN 2018
1	2		3	4	5
Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	1	Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD	140 Program RKPD yang Selaras dari 148 Program RPJMD	140 Program RKPD yang Selaras dari 140 Program yang ditargetkan	100
	2	Persentase OPD yang Renstranya selaras dengan RPJMD	44 OPD	44 OPD	100
	3	Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD	44 OPD	44 OPD	100
	4	Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target	13 Indikator dari 20 Indikator Kinerja RPJMD	11 Indikator dari 13 Indikator Kinerja RPJMD yang ditargetkan	84,61
	5	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam aplikasi perencanaan	90 Usulan dari 270 Usulan	87 Usulan dari 90 Usulan	96,67
<b>Rata-Rata Persentase Realisasi</b>					<b>96,25</b>

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA Banda Aceh**

Lampiran Peraturan Walikota Banda Aceh  
Nomor : 62 Tahun 2016  
Tanggal : 20 Desember 2016 M  
20 Rabiul Awal 1438 H



Keterangan :  
 ————— : Garis Atasan Langsung  
 - - - - - : Garis Pembinaan

